

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA
BERBASIS KETAHANAN SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN DI
DESA CANDIPARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO**

Dimas Kurnia Firmansyah

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dimasfirmansyah887@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Indah Murti

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
endah@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Pengembangan potensi desa adalah aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pemahaman bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dari yang semula “Membangun Desa” menjadi “Desa Membangun”, dimana “Desa Membangun” ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menginstruksikan bahwa penilaian kemajuan setiap pembangunan desa merujuk pada IDM (Indeks Desa Membangun). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis evaluasi pelaksanaan pengembangan potensi desa berdasarkan Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun di Desa Candipari Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan mengacu pada teori evaluasi William N. Dunn (2003). Dari hasil yang diperoleh, desa belum mampu memaksimalkan elemen efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan terhadap ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada Indeks Desa Membangun.

Kata kunci: *Desa, Potensi Desa, Indeks Desa Membangun*

ABSTRACT

The development of village potential is an important aspect of improving the quality of life and economic development of rural communities in Indonesia. Law No. 6/2014 on Villages provides an understanding that the paradigm of village development has changed from "Village Development" to "Village Development", where "Village Development" makes the village the subject of development that can plan, implement, and empower its own community. Therefore, the government through the Ministry of Villages and Transmigration (Kemendesa PDTT) instructs that the assessment of the progress of each village development refers to the IDM (Village Development Index). The purpose of this research is to analyze the evaluation of the implementation of village potential development based on Social Resilience, Economic Resilience, and Environmental Resilience on the Village Development Index in Candipari Village, Sidoarjo Regency. The research method used is a qualitative method with reference to the evaluation theory of William N. Dunn (2003). From the results obtained, the village has not been able to maximize the elements of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy towards social, economic, and environmental resilience in the Village Development Index.

Keywords: *Village, Village Potential, Village Development Index*

A. PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan dihormati di bawah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan hak asal dan/atau tradisi masyarakat, hak asal dan/atau hak adat yang dijunjung tinggi dan dihormati dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengembangan potensi desa adalah aspek yang penting dalam usaha meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, desa-desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Indonesia memiliki populasi yang besar, dengan sekitar 49% penduduknya tinggal di wilayah pedesaan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan pemahaman bahwa paradigma pembangunan desa mengalami perubahan dari yang semula "Membangun Desa" menjadi "Desa Membangun", dimana "Desa Membangun" ini menjadikan desa sebagai subjek pembangunan yang dapat merencanakan, melaksanakan, dan memberdayakan masyarakatnya sendiri. Pada paradigma ini, pemerintah desa bertugas untuk lebih memonitor, memperkuat, mendukung, dan mengawasi. Selaras dengan pergeseran paradigma tersebut, pengembangan desa memiliki berbagai tantangan dan implikasi sosial yang tidak bisa lepas dalam setiap prosesnya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemendesa PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) menginstruksikan bahwa penilaian kemajuan setiap pembangunan desa merujuk pada IDM (Indeks Desa Membangun).

Dari data yang diperoleh, keadaan desa di Indonesia dari tahun ke tahun mayoritas merupakan desa berkembang. Sementara itu di tahun 2023, sebanyak 11.456 desa merupakan desa mandiri, 23.027 desa maju, 28.740 desa berkembang, 6.736 desa tertinggal, dan sisanya sebanyak 4.338 desa merupakan desa sangat tertinggal. Dari sebanyak 11.456 desa yang digolongkan sebagai desa mandiri di tahun 2023, salah satu desa mandiri tersebut adalah Desa Candipari yang terletak di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Saat ini, Desa Candipari memperoleh rata-rata skor IDM 0.8287, dengan rincian IKS (Indeks Ketahanan Sosial) 0.903 / 36.32%, IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) 0.85 / 34.19%, dan IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan) 0.733 / 29.48%. Pada skor tersebut masih terdapat beberapa indikator yang belum terisi dengan lengkap yang penyebabnya masih belum diketahui apakah terdapat responden yang tidak mengisi atau mungkin terdapat kesalahan teknis saat menganalisis data dari data yang telah dikumpulkan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif digunakan oleh peneliti, dengan mengacu pada teori William N. Dunn (2003) yang memiliki enam elemen evaluasi yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode analisis data melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Desa Candipari memiliki visi “Mewujudkan Masyarakat Desa Candipari yang Berkualitas dan Berbudaya, Peduli pada Lingkungan, Terampil, Sejahtera dan Mandiri Dilandasi Iman dan Taqwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Desa Candipari memiliki potensi pariwisata yaitu dengan adanya Candi Pari dan Candi Sumur. Candi Pari ditemukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada 16 Oktober 1906, kemudian candi ini dipugar kembali oleh Departemen Kebudayaan pada tahun 1994-1996. Sedangkan Candi Sumur juga ditemukan pada tahun 1906 oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2006), yang mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan memiliki 6 tipe yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu kegiatan mencapai hasil yang diharapkan dengan mementingkan tujuan daripada usaha yang dilaksanakan. Jika hasilnya mendekati sasaran, maka semakin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil atau tujuan kebijakan. Dalam elemen efektivitas, pada hasil wawancara, Desa Candipari dapat dikatakan belum cukup efektif dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat sendiri karena masyarakat secara langsung menjadi bagian dari faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya bahwa masyarakat yang mengerti betul akan tiga faktor tersebut yaitu ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi dan efektivitas saling berkaitan, tipe efisiensi sebagai pununjang dalam pelaksanaan pelayanan untuk mencapai tujuan. Program Indeks Desa Membangun memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa jika dilaksanakan dengan baik. Program ini dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi desa dan membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam survei dan pengumpulan data untuk memastikan akurasi. Program ini juga harus mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat perdagangan, bukan hanya infrastruktur fisik seperti jalan.

Kecukupan

Pada elemen kecukupan berhubungan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan mengukur seberapa jauh hasil kebijakan dengan tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara, program ini belum cukup untuk menggambarkan kondisi nyata yang ada di desa, karena desa ini berstatus khusus yaitu desa wisata. Penting untuk memperhitungkan konteks khusus dari desa wisata. Desa tersebut mungkin memiliki karakteristik yang berbeda dari desa-desa lainnya, terutama karena ketergantungan pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Oleh karena itu, penilaian terhadap Indeks Desa Membangun harus memperhitungkan faktor-faktor unik ini agar mencerminkan kondisi sebenarnya dari desa wisata tersebut. Sebelum mengevaluasi nilai Indeks Desa Membangun, penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data dan perhitungannya telah dilakukan secara teliti dan obyektif. Keterlibatan aktif dari masyarakat desa dalam proses tersebut menjadi kunci untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Perataan

Perataan berkenaan dengan kebijakan yang akibat usahanya dilakukan secara merata, adil dan wajar. Suatu program dapat dikatakan efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaatnya merata. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, desa harus berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih terfokus. Sebagai contoh, masyarakat dapat memprioritaskan inisiatif yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, atau mempromosikan pariwisata desa, jika hasil penelitian mengindikasikan rendahnya ketahanan ekonomi. Selain itu, desa diharuskan mencari dukungan secara mandiri dari pemerintah daerah, Kementerian Desa PDTT, dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan ini dapat berupa bantuan teknis, dana, atau kemitraan untuk mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan berdasarkan capaian nilai ketahanan.

Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan diartikan sebagai respon dari suatu kegiatan, yang berarti tanggapan dari sasaran kebijakan. Responsivitas berarti seberapa jauh

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, kriteria ini penting karena dapat memuaskan semua kriteria lainnya. Dari wawancara yang telah dilakukan, pembangunan yang ada di Desa Candipari tergolong cukup menurut masyarakat. Pemanfaatan program Indeks Desa Membangun dinilai membantu dalam menganalisis kondisi pembangunan desa. Akan tetapi, penilaiannya terkadang tidak tepat dan hanya dinilai dari gambaran kasarnya. Menurut masyarakat Desa Candipari, yang paling dikeluhkan oleh masyarakat yang kesulitan dalam mengembangkan potensi desa, khususnya karena pengelolaan candi peninggalan Majapahit masih berada di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Hal ini menyulitkan masyarakat dalam mengajukan izin untuk mendirikan usaha seperti souvenir dan pujasera di sekitar kawasan candi.

Ketepatan

Elemen ketepatan menganalisis mengenai ketepatan kebijakan tersebut, apakah sudah tepat atau belum sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa Candipari, output dari program Indeks Desa Membangun belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Meskipun memberikan gambaran umum, data yang dihasilkan sering kali masih bersifat kasar dan kurang mendetail. Sementara itu, hasil wawancara menegaskan bahwa perlu dilakukan peningkatan dalam metode pengumpulan data dan pelibatan masyarakat desa. Partisipasi aktif masyarakat akan membantu memastikan bahwa data yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Selain itu, diharapkan juga Kementerian Desa PDTT dapat melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan program agar pemerintah desa dan masyarakat desa memahami akan program yang akan dijalankan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan pengembangan potensi desa berbasis Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan pada Indeks Desa Membangun. Maka dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa program ini masih belum berjalan secara maksimal. Dari enam elemen Evaluasi Kebijakan William N. Dunn, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan belum terpenuhi. Berikut penjelasan tiap-tiap elemen.

1. Pada elemen efektivitas terkait dengan kemampuan Indeks Desa Membangun untuk mencerminkan keadaan nyata ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, keberhasilannya ada pada pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Desa Candipari jika pemerintah desa melibatkan masyarakat karena masyarakat sendiri yang mengetahui betul akan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Akan tetapi, kendala atau hambatannya yaitu ada pada keakuratan data sehingga sulit untuk mengukur ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa.
2. Pada elemen efisiensi terkait daya guna program Indeks Desa Membangun dalam upaya peningkatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, program ini dapat memberikan gambaran jelas tentang kondisi desa dan

membantu mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam survei dan pengumpulan data untuk memastikan akurasi. Sedangkan terkait usaha desa untuk mencapai nilai ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang sesuai dengan keadaan nyata di desa, desa belum optimal dalam mengurangi kesenjangan yang ada di desa.

3. Pada elemen kecukupan, terkait hasil dari capaian nilai Indeks Desa Membangun, pemerintah desa belum memperhatikan karakteristik dari desa wisata itu sendiri yang memiliki karakteristik yang berbeda dari desa-desa lainnya, terutama karena ketergantungan pada pariwisata sebagai sumber pendapatan utama.
4. Pada elemen perataan terkait upaya desa dalam memanfaatkan capaian nilai ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, desa belum berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka dan menggunakan hasilnya sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan yang lebih terfokus. Sebagai contoh, masyarakat dapat memprioritaskan inisiatif yang membantu pertumbuhan ekonomi lokal, termasuk pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, atau mempromosikan pariwisata desa, jika hasil penelitian mengindikasikan rendahnya ketahanan ekonomi.
5. Pada elemen responsivitas terkait tanggapan dan keluhan masyarakat pada pembangunan dan pengembangan potensi desa, masyarakat cenderung mengeluhkan tentang pengembangan potensi desa yaitu pariwisata karena desa belum dilibatkan dalam pengelolaan candi peninggalan Majapahit yaitu Candi Pari dan Candi Sumur yang berada di bawah naungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur.
6. Pada elemen ketepatan terkait output dari program Indeks Desa Membangun dengan kondisi aktual ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Meskipun memberikan gambaran umum, data yang dihasilkan sering kali masih bersifat kasar dan kurang mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustari, Nuryanti. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Komputindo.
- Salusu. (2002). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik & Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia.
- Sondakh, Mantiri, & Kasenda. (2021). *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tondei Kec. Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan*. JURNAL GOVERNANCE (ISSN: 2088-2815)